

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) 25.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), 13.
- Poernomo, F., *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 4-5.
- Raharjo, M. M. I., *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 9.
- Rahmadi, R, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 27.

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

JURNAL

Abdullah, Dudung. "Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1.1 (2016): 83-103.

Alfie, Atieq Amjadallah, Khanifah Khanifah, and Maya Lailatul Mariskha. "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Terwujudnya *Good Village*

- Governance* (Studi Kasus di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 17.2 (2022).
- Anandy, Widyatmi. "Fungsi Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik." *Tadulako Master Law Journal* 4.3: 347-360.
- Aridhayandi, M. Rendi. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.4 (2018): 883-902.
- Asmawati, Ika, and Prayitno Basuki. "Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa." *Akuras: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2.1 (2019): 63-76.
- Ema, Nur. "Pengaruh Pelatihan dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai pada Puskesmas Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Science of Management and Students Research Journal (SMS)* 3.2 (2022): 88-94.
- Haris, Abdul, Heri Kusmanto, and Siti Mardiana. "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 6.1 (2016): 110-128.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.
- Junus, Dikson, et al. "*Good Village Governance* Di Desa Ayumolingo." *Governance* 11.1 (2023): 51-62.
- Kasenda, Hizkia, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *Governance* 1.2 (2021).
- Kurniasari, Devi. *Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Kurniati, Paramita Nur. "Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Daerah." *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)* 2.2 (2019): 26-39.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014

- (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5.2 (2017).
- Priyatun, Iis. *Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan*. Diss. Universitas Lampung, 2018.
- Rawas, Daerah Kabupaten Musi. "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi." *governance* 13.2 (2019).
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.
- Rumkel, Nam, and Tri Syafari. "Penguatan Inspektorat sebagai Lembaga Pengawas dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara)." *The Juris* 3.2 (2019): 165-166.
- Sabrina, Nisa. "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2 (2018): 108-114.
- Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani, dan Muhammad Agus Salim. "Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang." *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 6.04 (2017): 29.

WEBSITE

- Radar Magelang, Kades Gebang Kendal Nur Kholis Terbukti Korupsi Dana Desa Rp 245,835 Juta, Begini Modusnya, <https://radarmagelang.jawapos.com/jateng/684673635/kades-gebang-kendal-nur-kholis-terbukti-korupsi-dana-desa-rp-245835-juta-begini-modusnya>. Diakses pada 10 Juni 2024
- Halo Semarang, Terbukti Korupsi Dana Desa, Kades Gebang Kendal Divonis Satu Tahun Penjara <https://halosemarang.id/terbukti-korupsi-dana-desa-kades-gebang-kendal-divonis-satu-tahun-penjara>. Diakses pada 10 Juni 2024

Inspektorat Kendal Kab. go.id, Dasar Hukum

https://kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0328/lembaga_teknis/inspektur_kab_kendal. Diakses pada 10 Juni 2024

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/54_pemerintah-desadandanpemerintahan-desad

Sulis Rochayatun. "Harmonisasi Menuju *“Good Village Governance”*." IAI Jawa Timur, <https://iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/13>.

Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, 2021,

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>

Pengertian Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

Jenis-jenis Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

Kondisi Geografis, Portal Resmi Kabupaten Kendal

https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis.

Diakses pada 8 Maret 2025.

Kependudukan dan Migrasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal,

<https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=519>. Diakses pada 8 Maret 2025.

Jumlah Desa Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Kendal, <https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjc4IzE=/jumlah-desa-kelurahan-yang-memiliki-saranakesehatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kendal--2021.html>.

Diakses pada 8 Maret 2025.

Jumlah Desa Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan

Tingkat Pendidikan di Kabupaten

Kendal, <https://kendalkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjc3IzE=/jumlah->

[desa_kelurahan-yang-memiliki-fasilitas-sekolah-menurut-kecamatan-dan-tingkat-pendidikan-di-kabupaten-kendal--2021.html](#). Diakses pada 8 Maret 2025.

Dasar Hukum Inspektorat Kabupaten Kendal
https://kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0328/lembaga_teknis/inspektur_kab_kendal. Diakses 3 April 2025

LAMPIRAN

- A. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 100.4.7/437/SJ

NOMOR: 1 TAHUN 2023

NOMOR: NK/1/I/2023

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BURHANUDDIN, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si. selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.